



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG





PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,





BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyatuan proses pelayanan perizinan dan non perizinan, Pemerintah Kabupaten Gorontalo telah membentuk Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Gorontalo ;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Gorontalo perlu dilakukan penyesuaian jenis perizinan yang dilimpahkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gorontalo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) ;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);

KABAG HUKUM	SK/D	AS 2	SEKDA	WABUP
				

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221) ;
14. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222) ;

KABAG HUKUM	SKPD	AS 2	SEKDA	WABUP
				

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Nomor 310 Tahun 2011);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pirtu (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI GORONTALO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GORONTALO

Pasal I

Lampiran Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gorontalo (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 Nomor 26) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 2	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo

Ditetapkan di Limboto

pada tanggal 3 Februari 2020

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto

pada tanggal 3 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR 8

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGA PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GORONTALO

NO	NAMA IZIN	JENIS IZIN
1	Izin Usaha Perkebunan	Izin Usaha
2	Izin Usaha Obat Hewan	Izin Usaha
3	Izin Usaha Tanaman Pangan	Izin Usaha
4	Izin Usaha Hortikultura	Izin Usaha
5	Izin Usaha Peternakan	Izin Usaha
6	Pendaftaran Usaha Perkebunan	Izin Usaha
7	Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan	Izin Usaha
8	Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura	Izin Usaha
9	Pendaftaran Usaha Peternakan	Izin Usaha
10	Izin Usaha Industri	Izin Usaha
11	Izin Usaha Kawasan Industri	Izin Usaha
12	Izin Perluasan	Izin Usaha
13	Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)	Izin Usaha
14	Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika	Izin Usaha
15	Sertifikat Badan Usaha (SBU)	Komitmen Izin Komersial / Operasional
16	Izin Operasi (IO)	Komitmen Izin Komersial / Operasional
17	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)	Izin Usaha
18	Izin Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum	Izin Usaha
19	Izin Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum	Izin Usaha
20	Izin Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus	Izin Usaha
21	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	Izin Usaha
22	Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan	Izin Usaha
23	Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau	Izin Usaha
24	Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau lintas antar propinsi dan/atau antar negara	
25	Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan	Komitmen Izin Komersial / Operasional
26	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas	Komitmen Izin Komersial / Operasional
27	Izin Pelabuhan Umum	Izin Usaha
28	Izin Usaha Angkutan Laut	Izin Usaha
29	Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (Angkutan di Perairan)	Izin Usaha
30	Izin Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan	Izin Usaha
31	Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk dan/atau Reklamasi	Komitmen Izin Komersial / Operasional
32	Penetapan Terminal Khusus Yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri	Komitmen Izin Komersial / Operasional
33	Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	
34	Penetapan Trase Jalur Kereta Api Umum	Komitmen Izin Komersial / Operasional
35	Penetapan Trase Jalur Kereta Api Khusus	Komitmen Izin Komersial / Operasional
36	Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan	Izin Usaha

37	Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada SMK	Komitmen Izin Komersial / Operasional
38	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal	Komitmen Izin Komersial / Operasional
39	Sertifikat Produksi Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional	Komitmen Izin Komersial / Operasional
40	Sertifikat Produksi Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT	
41	Izin Toko Alat Kesehatan	
42	Izin Mendirikan Rumah Sakit	Izin Usaha
43	Izin Operasional Rumah Sakit	Komitmen Izin Komersial / Operasional
44	Izin Operasional Klinik	Komitmen Izin Komersial / Operasional
45	Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus	Komitmen Izin Komersial / Operasional
46	Izin Apotek	Komitmen Izin Komersial / Operasional
47	Izin Toko Obat	Komitmen Izin Komersial / Operasional
48	Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	Komitmen Izin Komersial / Operasional
49	Izin Toko Obat	Komitmen Izin Komersial / Operasional
50	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	Komitmen Izin Komersial / Operasional
51	Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ)	Komitmen Izin Komersial / Operasional
52	Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta	Izin Usaha
53	Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	Izin Usaha
54	Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Pastura Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung (IUPK Silvopastura)	
55	Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Fishery Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung (IUPK Silvo Fishery)	Izin Usaha
56	Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Izin Usaha
57	Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hidup (SPPL)	Izin Usaha
58	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa	Izin Usaha
59	Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil Komitmen Izin Komersial / Operasional	
60	Izin Pembuangan Air Limbah	Komitmen Izin Komersial / Operasional
61	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	Izin Usaha

KABAG HUMCM	SKPD	AS 2	SEKDA	WABUP

62	Izin Pelaksanaan Reklamasi	Izin Usaha
63	Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk nelayan kecil	Izin Usaha
64	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)	Komitmen Izin Komersial / Operasional
65	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)	Komitmen Izin Komersial / Operasional
66	Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil	Izin Usaha
67	Tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan	Izin Usaha
68	Tanda daftar usaha pergaraman bagi petambak garam kecil	Izin Usana
69	Buku Kapal Perikanan	Komitmen Izin Komersial / Operasional
70	Izin Usaha Jasa Konstruksi	Izin Usaha
71	Surat Izin Peil Banjir	Izin Usaha
72	Izin Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun	Komitmen Izin Komersial / Operasional
73	Izin Pengubahan Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun	Komitmen Izin Komersial / Operasional
74	Pengesahan Pertelaan	Komitmen Izin Komersial / Operasional
75	Sertifikat HMRS a/n Developer	Komitmen Izin Komersial / Operasional
76	Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (HMSRS) a/n pembeli	Komitmen Izin Komersial / Operasional
77	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Izin Usaha
78	Izin Koperasi Simpan Pinjam	Izin Usaha
79	Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam	Komitmen Izin Komersial / Operasional
80	Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembaritu Koperasi Simpan Pinjam	Komitmen Izin Komersial / Operasional
81	Izin Pembukaan Kantor: Kas Koperasi Simpan Pinjam	Komitmen Izin Komersial / Operasional
82	Surat Izin Usaha Perdagangan	Izin Usaha
83	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	Komitmen Izin Komersial / Operasional
84	Tanda Daftar Gudang	Komitmen Izin Komersial / Operasional

DAFTAR IZIN SICANTIK CLOUD KABUPATEN GORONTALO

No	Nama Izin	Jenis Izin
85	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	
86	Izin Praktek Dokter Umum	PROFESI
87	Izin Praktek Dokter Spesialis	PROFESI
88	Izin Praktek Dokter Gigi	PROFESI
89	Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis	PROFESI
90	Izin Praktek Apoteker	PROFESI
91	Izin Praktek Perawat	PROFESI



92	Izin Praktek Bidan	PROFESI
93	Izin Praktek Ahli Kesehatan Masyarakat	PROFESI
94	Izin Praktek Ahli Elektromedis (SIP-E)	PROFESI
95	Izin Praktek Apoteker	PROFESI
96	Izin Praktek Teknis Kefarmasian	PROFESI
97	Izin Kerja Retraksionis Potisen/Obtometris	PROFESI
98	Izin Praktek Radiografer	PROFESI
99	Izin Praktek Elektro Medis	PROFESI
100	Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik	PROFESI
101	Izin Praktek Fisikawan Medik	PROFESI
102	Izin Praktek Radio Terapis	PROFESI
103	Izin Praktek Ortotik Prostetik	PROFESI
104	Izin Praktek Kardiorvaskuler	PROFESI
105	Izin Praktek Psikologi Klinis	PROFESI
106	Izin Praktek Analisis Kesehatan	PROFESI
107	Izin Praktek Fisioterapis	PROFESI
108	Izin Praktek Okupasi	PROFESI
109	Izin Praktek Terapis	PROFESI
110	Izin Praktek Terapis Bicara	PROFESI
111	Izin Praktek Akupuntur	PROFESI
112	Izin Kerja Sehat Pakai Air	PROFESI
113	Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional (STPT)	PROFESI
114	Izin Pengobatan Tradisional	PROFESI
115	Izin Rumah Bersalin	PROFESI
116	Izin Praktek Berkelompok	PROFESI
117	Izin Penyelenggaraan Praktek Bidan	PROFESI
118	Izin Klinik Dokter Keluarga/Dokter Gigi	PROFESI
119	Izin Kedokteran Komplementer	PROFESI
120	Izin Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer Alternatif	PROFESI
121	Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik	PROFESI
122	Surat Pengelolaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	PROFESI
123	Izin Sarana Lain Penunjang Kesehatan yang setara	PROFESI
124	Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	PROFESI
125	Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan	PROFESI
126	Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan	PROFESI
127	Izin Praktek Perekam Medis dan Informasi Medis	PROFESI
128	Izin Praktek Teknik Kardiorvaskuler	PROFESI
129	Izin Praktek Teknisi Pelayanan Darah	PROFESI
130	Izin Praktek Teknisi Gigi	PROFESI
131	Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut dan Audiologis	PROFESI

BUPATI GORONTALO, *k*

NELSON POMALINGO